

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1.1 Landasan Teori

1.1.1 Teori Keuangan Publik

Keuangan publik merupakan cabang ilmu ekonomi yang membahas mengenai bentuk tanggungjawab pemerintah dalam mengelola keuangan dan sumber daya publiknya. Keuangan publik menganalisis hasil dari kinerja pemerintah melalui kebijakan fiskal, pendapatan dan pengeluaran pemerintah, manajemen utang publik, efisiensi dan efektivitas anggaran, dan bagaimana dampak alokasi anggaran pemerintah terhadap perekonomian masyarakat secara keseluruhan.

Keuangan publik menjadi acuan bagaimana pemerintah melakukan pengadaan, pemeliharaan, dan segala pengeluaran yang dilakukan untuk menjalankan tugas. Menurut Harvey S. Rossen dan Ted Gayer dalam bukunya, *Public Finance* disebut juga dengan istilah *Ekonomi Publik*, yang mengartikan bahwa keuangan publik membahas mengenai analisis berbagai pajak pemerintah dan kebijakan pembelanjanya (Jaelani, 2018).

Keuangan publik menjadi acuan dalam pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah. Hasil dari keputusan yang diambil pemerintah akan sangat besar dampaknya pada ekonomi dan keuangan rumah tangga dan swasta di wilayah tersebut. Sehingga penting menganalisis keuangan publik melalui hasil pendapatan, belanja pemerintah, belanja alokasi sumber dana, distribusi pendapatan, dan stabilitas ekonomi.

1.1.2 Teori Desentralisasi Fiskal

Teori desentralisasi fiskal merupakan bentuk alokasi dan pengelolaan keuangan publik dari APBN yang di serahkan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Desentralisasi fiskal sebagai bentuk pemusatan wewenang pemerintah (Rante et al., 2018). Desentralisasi fiskal bertujuan untuk memberikan hak otonom kepada pemerintah daerah untuk mengelola keuangan sendiri untuk pengembangan daerah tersebut. Daerah memiliki hak otonom yang diatur dalam undang-undang untuk mengatur dan mengelola sumber daya yang dimiliki sehingga pemerintah pusat mampu mengkoordinir beban dan tanggungjawab secara merata, adanya desentralisasi fiskal ini membantu daerah-daerah diseluruh Indonesia mengembangkan potensi daerahnya masing-masing.

Desentralisasi fiskal digunakan sejak tahun 2001, kebijakan ini adalah bentuk dukungan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mendorong ekonomi kreatif, mengurangi ketimpangan antar daerah dan meningkatkan kemandirian daerah untuk mengenai sumber-sumber pendapatan yang dimiliki (Mega Christia & Ispriyarso, 2019).

1.1.3 Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan catatan atau ringkasan tertulis yang menjelaskan semua pengeluaran dan pemasukan keuangan sebuah lembaga atau organisasi semacamnya dalam suatu periode waktu tertentu. Laporan keuangan menyajikan data dan informasi yang relevan mengenai kinerja keuangan suatu entitas, termasuk pendapatan, biaya, aset, kewajiban, dan modal.

Laporan keuangan menjadi gambaran mengenai posisi keuangan, laporan rugi laba, dan berbagai perubahan modal lainnya dalam suatu lembaga (Pramono, 2014). Laporan keuangan dibentuk biasanya perbulan, triwulan, semesteran dan bahkan tahunan. Hal tersebut mengacu pada kepentingan masing-masing pihak eksternal suatu instansi. Laporan keuangan perlu dilakukan untuk mengetahui kinerja dan perubahan keuangan, sehingga mudah dalam pengambilan leputusan.

Aktivitas ekonomi di Indonesia dibagi menjadi 3 bagian yaitu ekonomi privat, publik dan ekonomi nir laba. Dalam ekonomi publik seringkali di sebut dengan dengan dua entitas yaitu akuntansi dan pelaporan. Entitas akuntansi yaitu unit pemerintahan yang mengelola anggaran, aset dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan memberikan laporan keuangan dengan dasar akuntansi. Sedangkan entitas pelaporan yaitu unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang sudah ditentukan di perundang-undangan bahwa wajib membuat laporan pertanggungjawaban laporan keuangan dengan tujuan (Pramono, 2014).

- a. Pemerintahan pusat
- b. Pemerintahan daerah
- c. Kepada kementerian negara
- d. Kepada satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat dan daerah maupun organisasi lainnya.

1.1.4 Analisis Laporan Keuangan

Analisis laporan keuangan ialah tahap menggali, memeriksa, dan menilai informasi yang tercatat dalam laporan keuangan suatu entitas untuk mengetahui kemampuan keuangan, kestabilan, dan nilai perusahaan tersebut. Analisis ini bertujuan untuk mengambil wawasan dan informasi yang lebih dalam mengenai kondisi keuangan suatu entitas, serta membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik. Analisis laporan keuangan sangat penting dilakukan untuk mengetahui juga mengevaluasi suatu laporan keuangan instansi untuk memprediksi kondisi kinerja keuangan (Ismail, 2022).

Analisis laporan keuangan sangat penting dilakukan untuk mengetahui segala macam informasi yang dilaporkan dalam laporan keuangan. Analisis laporan keuangan juga memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang kondisi keuangan suatu entitas dan membantu pengambilan keputusan yang lebih baik.

1.1.5 Penilaian Kinerja

Penilaian adalah bentuk sistem yang digunakan untuk menentukan nilai atau hasil dari kinerja seseorang baik individu maupun kelompok, sedangkan kinerja ialah kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan yang sudah ditentukan dalam suatu instansi/organisasi (Pramono, 2014).

Penilaian kerja adalah proses sistematis untuk mengevaluasi kinerja individu dalam suatu organisasi. Tujuan dari penilaian kerja adalah untuk menilai sejauh mana karyawan mencapai tujuan pekerjaan mereka, sejauh mana mereka memenuhi standar yang ditetapkan, serta untuk memberikan umpan balik yang konstruktif untuk pengembangan dan perbaikan kinerja di masa depan.

1.1.6 Pengelolaan Anggaran

Pengelolaan anggaran adalah proses perencanaan, pengalokasian, pengendalian, dan pelaporan penggunaan dana atau sumber daya keuangan yang dimiliki oleh suatu entitas, seperti pemerintah, organisasi, atau individu. Tujuan dari pengelolaan anggaran adalah untuk memastikan bahwa dana atau sumber daya yang tersedia digunakan secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengelolaan juga diartikan sebagai keterampilan untuk meramu

komponen dan unsur-unsur yang terlibat dalam suatu sistem untuk mencapai hasil/tujuan yang direncanakan (Naway, 2016).

1.1.7 Efektivitas

Efektivitas adalah kemampuan atau tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam konteks pengelolaan keuangan atau manajemen secara umum, efektivitas mengacu pada sejauh mana suatu tindakan atau kegiatan dapat mencapai hasil yang diinginkan atau tujuan yang telah ditetapkan.

Efektivitas pengelolaan keuangan berarti kemampuan untuk mengelola dana dengan baik sehingga tujuan-tujuan keuangan dapat tercapai. Hal ini melibatkan perencanaan keuangan yang baik, pengalokasian dana yang tepat, pengendalian pengeluaran, evaluasi kinerja, dan pemantauan yang efektif terhadap penggunaan dana. Pengelolaan keuangan dikatakan efektif dilihat dari tercapai atau tidaknya program yang sudah ditetapkan (Tiorma Rosmauli Sitompul, 2018).

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri N0. 690.900-327 Tahun 1994 tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan, Standarisasi Tingkat Efektivitas ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 2.1 Kriteria Efektivitas

Kemampuan Keuangan	Rasio Efektivitas %
Sangat Efektif	>100
Efektif	100
Cukup Efektif	90-99
Kurang Efektif	75-89
Tidak Efektif	<75

Sumber: (Mahmudi dalam Kosmas and Wendy 2022)

1.1.8 Produk Domestik Regional Bruto

Dalam pengelolaan ekonomi Produk Domestik Regional Bruto berperan penting dalam mengetahui keadaan ekonomi suatu wilayah. PDRB menggambarkan keseluruhan pendapatan dan pengeluaran yang terjadi dalam suatu daerah melalui semua sektor ekonomi dalam suatu wilayah (Hasibuan et al., 2022).

Produk Domestik Regional Bruto digunakan dalam pengukuran kondisi perekonomian yang berada di tingkat Kabupaten, Kota dan Provinsi. Pengukuran dilakukan dengan pengukuran atas dasar harga berlaku dan konstan, dimana PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) diukur dengan harga tahun berjalan dan PDRB atas dasar harga konstan diukur berdasarkan harga yang berlaku pada 1 tahun tertentu. Secara konsep PDRB menggunakan 3 bentuk pendekatan yaitu:

1. Produksi

Pendekatan produksi merupakan nilai tambah yang diambil dari keseluruhan hasil produk barang dan jasa pada wilayah tersebut, pendekatan produksi menurut lapangan usaha diantaranya ialah.

- a. Sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan
- b. Sektor pertambangan dan penggalian
- c. Sektor industri pengolahan
- d. Sektor listrik, gas dan air bersih
- e. Sektor konstruksi
- f. Sektor perdagangan, hotel dan restoran
- g. Sektor pengangkutan dan komunikasi
- h. Sektor keuangan, real estate dan jasa perusahaan
- i. Jasa-jasa.

2. Pengeluaran

Produk domestik regional bruto berdasarkan pengeluaran dibagi menjadi 6 komponen yaitu:

- a. Pengeluaran konsumsi rumah tangga
- b. Pengeluaran konsumsi pemerintah
- c. Pembentukan modal tetap domestik bruto
- d. Perubahan inventori
- e. Ekspor barang dan jasa
- f. Impor barang dan jasa

3. Pendapatan

Pendekatan pendapatan dilakukan untuk mengukur hasil dari masing-masing sektor ekonomi, pendekatan ini membantu dalam pendataan sejauh mana pendapatan dan pengeluaran dapat berkontribusi terhadap pembentukan PDRB.

1.1.9 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

1. Pengertian APBD

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan rencana anggaran pendapatan dan pengeluaran yang disusun oleh pemerintah daerah untuk periode tertentu, biasanya setahun. APBD mencakup berbagai sumber pendapatan yang dimiliki oleh pemerintah daerah dan pengeluaran yang akan dilakukan untuk membiayai berbagai program, proyek, dan kegiatan pemerintah daerah. APBD merupakan suatu daftar rincian penerimaan dan belanja daerah yang sekaligus berfungsi sebagai alat atau dasar pengelolaan keuangan daerah dalam setiap tahun anggaran tertentu (Rosmayanti et al., 2022).

APBD juga diartikan sebagai dokumen untuk memperlihatkan kondisi keuangan pemerintah daerah yang di dalamnya tercantum informasi mengenai pendapatan, belanja, dan pembiayaan (Trianto, 2016). APBD memiliki peran yang sangat penting dalam pengelolaan keuangan daerah. Melalui APBD, pemerintah daerah dapat mengatur dan mengendalikan pengeluaran serta memastikan tersedianya sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pemerintah daerah. Selain itu, APBD juga sebagai instrumen untuk mewujudkan tujuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah pemerintah daerah tersebut.

2. Fungsi Anggaran

Anggaran APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) memiliki beberapa fungsi yang penting dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Berikut adalah beberapa fungsi anggaran APBD:

a) **Alat Perencanaan**

Anggaran APBD digunakan sebagai alat untuk merencanakan penggunaan dana atau sumber daya keuangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Melalui proses perencanaan anggaran, tujuan, prioritas, dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode tertentu ditetapkan. Anggaran APBD memberikan arah dan fokus dalam mengalokasikan dana ke berbagai sektor dan program pembangunan.

b) **Alat Pengendalian**

Anggaran APBD juga berfungsi sebagai alat untuk mengendalikan penggunaan dana atau sumber daya keuangan. Dengan mengalokasikan dana secara terperinci untuk setiap departemen, proyek, atau kegiatan, pemerintah daerah dapat memantau dan mengawasi penggunaan dana secara efektif. Pengendalian anggaran melibatkan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terhadap penggunaan dana untuk memastikan kepatuhan terhadap rencana anggaran yang telah ditetapkan.

c) Alat Evaluasi Kinerja

Anggaran APBD juga berperan sebagai alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pembangunan. Dengan membandingkan realisasi anggaran dengan target yang telah ditetapkan, pemerintah daerah dapat menilai sejauh mana pencapaian tujuan dan hasil yang dicapai. Evaluasi kinerja anggaran membantu pemerintah daerah dalam mengidentifikasi keberhasilan dan tantangan dalam pelaksanaan program serta membuat perbaikan di masa mendatang.

d) Alat Transparansi dan Akuntabilitas

Anggaran APBD juga berfungsi sebagai alat untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Dengan menyusun dan melaporkan laporan keuangan yang akurat dan terperinci, pemerintah daerah memberikan informasi yang jelas dan terbuka kepada masyarakat tentang penggunaan dana publik. Hal ini memungkinkan adanya pengawasan publik, partisipasi dalam pengambilan keputusan, dan pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pengelolaan keuangan yang dilakukan.

1.1.10 Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah merujuk pada sumber-sumber pemasukan yang diterima oleh pemerintah daerah dalam rangka membiayai pengeluaran dan memenuhi kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik di wilayah tersebut. Pendapatan daerah dapat berasal dari beberapa sumber, antara lain:

a. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan tulang punggung pembiayaan di suatu daerah (Matande et al., 2018). PAD dihasilkan oleh pemerintah daerah yang bersumber dari dalam wilayahnya sendiri. PAD menjadi salah satu sumber pendapatan yang penting bagi pemerintah daerah untuk membiayai pengeluaran dalam menjalankan tugas dan fungsi pemerintah serta memenuhi kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik di daerah tersebut. Pendapatan asli daerah menjadi salah satu tolak ukur kemandirian daerah.

Pendapatan asli daerah ialah pendapatan yang diperoleh dari wilayah tugas teritorial,

kebutuhan daerah, efek samping dari organisasi yang di klaim lokal, konsekuensi dari kekayaan lokal yang terisolasi dewan, dan pendapatan asli lokal lainnya (Purba, 2022).

Pendapatan Asli Daerah terdiri dari beberapa komponen, antara lain:

1. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pemasukan yang diperoleh dari wajib pajak yang berada di wilayah pemerintah daerah. Pajak daerah dapat mencakup berbagai jenis, seperti pajak properti (rumah, tanah, bangunan), pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, pajak parkir, dan lain-lain. Pajak daerah ini dikenakan sesuai dengan peraturan yang berlaku di daerah tersebut. Pajak sifatnya memaksa karena hasil pajak akan dikelola sepenuhnya untuk membiayai penyelenggaraan dan pembangunan pemerintah (Matande et al., 2018).

2. Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah pemasukan yang diperoleh sebagai imbalan atas pelayanan atau penggunaan fasilitas umum yang disediakan oleh pemerintah daerah. Retribusi bentuk penerimaan daerah yang dipungut sebagai pembayaran atau imbalan langsung atas pelayanan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat suatu daerah (Wahab et al., 2015).

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah

Pendapatan ini berasal dari pengelolaan kekayaan daerah, seperti pendapatan dari pengelolaan aset daerah, sewa atau penggunaan tanah dan bangunan, royalti atas sumber daya alam, dividen dari partisipasi kepemilikan saham di perusahaan, dan lain-lain. Hasil pengelolaan kekayaan daerah berasal dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Pengelolaan Kekayaan yang di Pisahkan. Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 pendapatan ini di rinci berdasarkan 3 bagian (Kireina & Octaviani, 2021):

- a. Bagian laba atau penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
- b. Bagian laba atas penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
- c. Bagian laba penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok masyarakat.

4. Pendapatan Lain-lain

Komponen ini mencakup pendapatan daerah lain yang tidak termasuk dalam pajak, retribusi, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah. Pendapatan ini dapat berasal

dari berbagai sumber, seperti pendapatan dari lelang atau penjualan aset, pendapatan dari sumber daya alam, denda atau sanksi administratif, pendapatan dari usaha milik daerah, dan lain sebagainya.

Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendapatan yang signifikan bagi pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi pemerintahan, memberikan pelayanan publik, serta membiayai pembangunan di wilayahnya. Pemerintah daerah perlu melakukan pengelolaan pendapatan asli daerah dengan baik, termasuk melakukan pemungutan, pengawasan, dan pengelolaan yang transparan, agar dapat memaksimalkan potensi pendapatan dan mengoptimalkan penggunaannya untuk kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.

1.1.11 Dana Perimbangan

Dana perimbangan adalah dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Assidi, 2016). Dana perimbangan merujuk pada alokasi dana yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sebagai bagian dari sistem pembiayaan keuangan negara. Tujuan utama dana perimbangan adalah untuk memperkuat keuangan daerah yang kurang berkembang atau memiliki keterbatasan sumber daya agar dapat menyelenggarakan pelayanan publik dan pembangunan secara efektif.

1. Dana bagi hasil

Dana bagi hasil adalah salah satu bentuk dana perimbangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dana ini merupakan alokasi dana yang berasal dari pendapatan negara atau penerimaan pajak tertentu yang dikumpulkan oleh pemerintah pusat dan kemudian dibagi secara adil kepada pemerintah daerah. Dana bagi hasil adalah solusi untuk mengurangi ketimpangan yang sering terjadi antara pemerintah dengan pemerintah daerah (Ernayani, 2017).

2. Dana alokasi umum

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah salah satu bentuk transfer keuangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang bertujuan untuk mendorong kesejahteraan dan pembangunan di tingkat daerah. Dana ini merupakan bagian dari pendapatan pemerintah daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) (Santoso & Rofiq, 2013).

Dana alokasi juga menjadi acuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah (Ernayani, 2017). DAU memiliki peran yang penting dalam memastikan

adanya kesetaraan pembangunan antara daerah-daerah di dalam suatu negara. Transfer keuangan ini membantu pemerintah daerah yang memiliki keterbatasan pendapatan sendiri untuk melaksanakan fungsi pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di wilayah mereka.

3. Dana Alokasi Khusus

Dana alokasi khusus adalah dana yang bersumber dari APBN yang diberikan kepada daerah untuk pendanaan kegiatan khusus daerah dan tidak menyeleweng dari prioritas nasional (Assidi, 2016). DAK bertujuan untuk mendukung dan mempercepat pembangunan di daerah-daerah yang memiliki kebutuhan khusus atau proyek-proyek yang strategis.

Dana alokasi khusus (DAK) ditujukan untuk kegiatan investasi jangka panjang, investasi jangka pendek, peningkatan kinerja daerah, perbaikan dan peningkatan sarana dan prasarana pelayanan masyarakat tergolong dalam prioritas nasional (Unud, 2018).

4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah merujuk pada sumber pendapatan yang sah atau legal yang diperoleh oleh pemerintah daerah, seperti pemerintah kota, pemerintah kabupaten, atau pemerintah provinsi. Pendapatan ini digunakan untuk mendukung pembiayaan operasional pemerintah daerah dan pelaksanaan program-program publik. Lain-lain pendapatan yang sah juga menjadi pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah, dana peirmbangan, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatann yang ditetapkan pemerintah (Nurdiwaty et al., 2017).

1.1.12 Belanja Daerah

Belanja daerah merupakan fungsi dari penerimaan daerah (Gorahe, Irdha Anisyah Marsudi Masinambow & Engka, 2014). Belanja daerah berfungsi untuk menyediakan sarana dan prasarana publik yang tidak bisa dipenuhi oleh swasta. Namun, dalam penyediaan saran prasarana oleh pemerintah daerah tidak secara langsung melainkan perlu adanya perencanaan yang baik dan sesuai terlebih dahulu.

Belanja daerah juga diartikan sebagai pengeluaran yang berasal dari kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana dan menjadi kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran, sehingga tidak akan diperoleh pembayarannya kembali ke daerah. Belanja daerah dibagi menjadi 2 yaitu belanja langsung yang dianggarkan sesuai dengan program kegiatan yang sifatnya sudah di tetapkan dan belanja tidak

langsung merupakan belanja yang yang di anggarkan diluar program kerja (Ernayani, 2017).

Ada beberapa macam belanja daerah yang umum dilakukan oleh pemerintah daerah atau otoritas lokal. Berikut ini beberapa macam belanja daerah yang umum ditemui diantaranya:

a. Belanja pegawai

Belanja pegawai adalah pengeluaran yang dilakukan oleh suatu entitas, seperti organisasi pemerintah atau perusahaan, untuk membayar gaji dan tunjangan bagi pegawai atau karyawan yang bekerja di dalamnya. Belanja pegawai mencakup semua biaya yang terkait dengan tenaga kerja, seperti gaji pokok, tunjangan kesehatan, tunjangan pensiun, insentif, dan biaya pelatihan.

Belanja pegawai adalah pengeluaran yang dilakukan oleh suatu entitas, seperti organisasi pemerintah atau perusahaan, untuk membayar gaji dan tunjangan bagi pegawai atau karyawan yang bekerja di dalamnya (Pappa, 2022). Belanja pegawai meliputi semua biaya yang terkait dengan tenaga kerja, seperti gaji pokok, tunjangan kesehatan, tunjangan pensiun, insentif, dan biaya pelatihan. Belanja pegawai merupakan salah satu komponen utama dari anggaran organisasi dan biasanya menjadi bagian terbesar dari pengeluaran mereka.

b. Belanja barang dan jasa

Belanja barang dan jasa mengacu pada pengeluaran yang dilakukan oleh suatu entitas, seperti pemerintah atau perusahaan, untuk memperoleh barang atau jasa yang diperlukan dalam operasional mereka. Dalam konteks ini, "barang" merujuk pada benda fisik yang dapat diperoleh atau diperdagangkan, sedangkan "jasa" merujuk pada kegiatan atau layanan yang dilakukan oleh individu atau perusahaan. Belanja Barang dan jasa merupakan pengadaan barang yang memiliki kegunaannya tidak lebih dari 12 bulan dan/atau pelaksanaan kegiatan dalam bentuk jasa (Pappa, 2022).

c. Belanja modal

Belanja modal adalah dana yang dianggarkan oleh pemerintah daerah yang diperuntukkan untuk peningkatan aset daerah dan digunakan untuk peningkatan pelayanan publik (Ferdiansyah et al., 2018).

d. Belanja lainnya

Belanja lainnya adalah kategori pengeluaran yang mencakup semua jenis pengeluaran yang tidak termasuk dalam kategori belanja barang atau

jasa. Ini adalah kategori yang cukup luas dan dapat mencakup berbagai jenis pengeluaran yang berbeda, tergantung pada konteksnya. Beberapa bentuk belanja lainnya meliputi:

1. Belanja modal: Ini mencakup pengeluaran untuk memperoleh aset tetap atau jangka panjang yang digunakan dalam operasional organisasi, seperti gedung, tanah, mesin, peralatan berat, atau peralatan produksi.
2. Belanja investasi: Ini mencakup pengeluaran yang dilakukan untuk mengakuisisi investasi atau kepemilikan saham dalam entitas lain. Contohnya termasuk pembelian saham atau obligasi perusahaan, investasi properti, atau investasi dalam portofolio efek.
3. Belanja modal manusia: Ini mencakup pengeluaran untuk pelatihan, pengembangan, atau pendidikan pegawai agar meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka. Hal ini bisa melibatkan biaya pendaftaran ke seminar atau konferensi, program pelatihan khusus, atau biaya pendidikan formal seperti kuliah atau program sertifikasi.
4. Belanja operasional: Ini mencakup pengeluaran rutin yang diperlukan dalam menjalankan operasional sehari-hari suatu organisasi. Ini bisa termasuk biaya utilitas (listrik, air, gas), biaya sewa, biaya perawatan gedung, biaya komunikasi, biaya administrasi, atau biaya pemasaran.
5. Belanja kegiatan sosial: Ini mencakup pengeluaran yang berkaitan dengan kegiatan sosial, amal, atau filantropi organisasi. Contohnya termasuk sumbangan ke lembaga amal, sponsor acara amal, atau program tanggung jawab sosial perusahaan.

1.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya dengan judul “Anlisis Analisis Pengaruh PAD, DAU , dan DAK Terhadap PDRB Kabupaten/Kota Di Provinsi Nusa Tenggara Barat” dengan analisis data panel menyatakan bahwa PAD tidak signifikan dan bersifat negatif, PAD signifikan dan DAK tidak signifikan (Mafahir & Soelistiyo, 2017).

Penelitian sebelumnya yang berjudul “Faktor-Faktor yang mempengaruhi PDRB Kabupaten/Kota Jawa Tengah Tahun 2008-2012” penelitian ini bertujuan untuk menganalisa apa saja faktor-faktor besar yang mempengaruhi PDRB di Jawa Tengah dengan menggunakan

analisis regresi linier berganda melalui perhitungan OLS dengan data time series tahun 2008-2012, hasil penelitian tersebut menunjukkan hasil secara parsial tabungan dan kredit mempunyai pengaruh signifikan sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Daerah tidak signifikan terhadap PDRB Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah (Rahman & Chamelia, 2015).

Penelitian sebelumnya dengan judul “Pajak Daerah dan Pengaruhnya Terhadap PDRB di Provinsi Kalimantan Timur” dengan tujuan untuk melihat sejauh mana pengaruh pajak daerah, belanja modal, dan tingkat partisipasi angkatan kerja terhadap PDRB. Penelitian ini menggunakan data panel dengan hasil fixed effect model (FEM) sebagai model terbaik, berdasarkan penelitian tersebut menghasilkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah memiliki pengaruh signifikan terhadap PDRB sedangkan tingkat partisipasi angkatan kerja memiliki pengaruh yang signifikan namun hubungannya negatif terhadap PDRB (Mutiarra, 2015).

Penelitian sebelumnya yang berjudul “Pengaruh Belanja Modal, Infrastruktur dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Produk Regional Bruto di Provinsi Sumatra Selatan” dengan tujuan mengukur pertumbuhan ekonomi di Sumatra Barat dengan menggunakan time series selama 5 tahun dan data cross section. Hasil penelitian tersebut menunjukkan fixed model effect sebagai model terbaik dengan hasil belanja modal, infrastruktur panjang jalan, dan indeks pembangunan manusia mempunyai pengaruh signifikan terhadap PDRB di Kota/Kabupaten Sumatera Selatan (Handayani et al., 2019).

Penelitian sebelumnya yang berjudul “Analisis Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas PAD, dan Rasio Efisiensi PAD Pada Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sukabumi” dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana kinerja keuangan Kabupaten Sukabumi dengan cara menganalisis rasio kemandirian, rasio efektivitas, dan rasio efisiensi pendapatan asli daerah. Metode analisis yang digunakan ialah statistik deskriptif. Dari penelitian ini didapatkan hasil rasio kemandirian masih sangat rendah dan menunjukkan pola hubungan instruktif, rasio efektivitas PAD sangat efektif, dan kinerja keuangan berdasarkan rasio efisiensi tergolong sangat efisien (Kartika et al., 2016).

Penelitian sebelumnya dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Manado”. Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda, dari hasil pembahasan menunjukkan bahwasanya secara parsial pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh positif

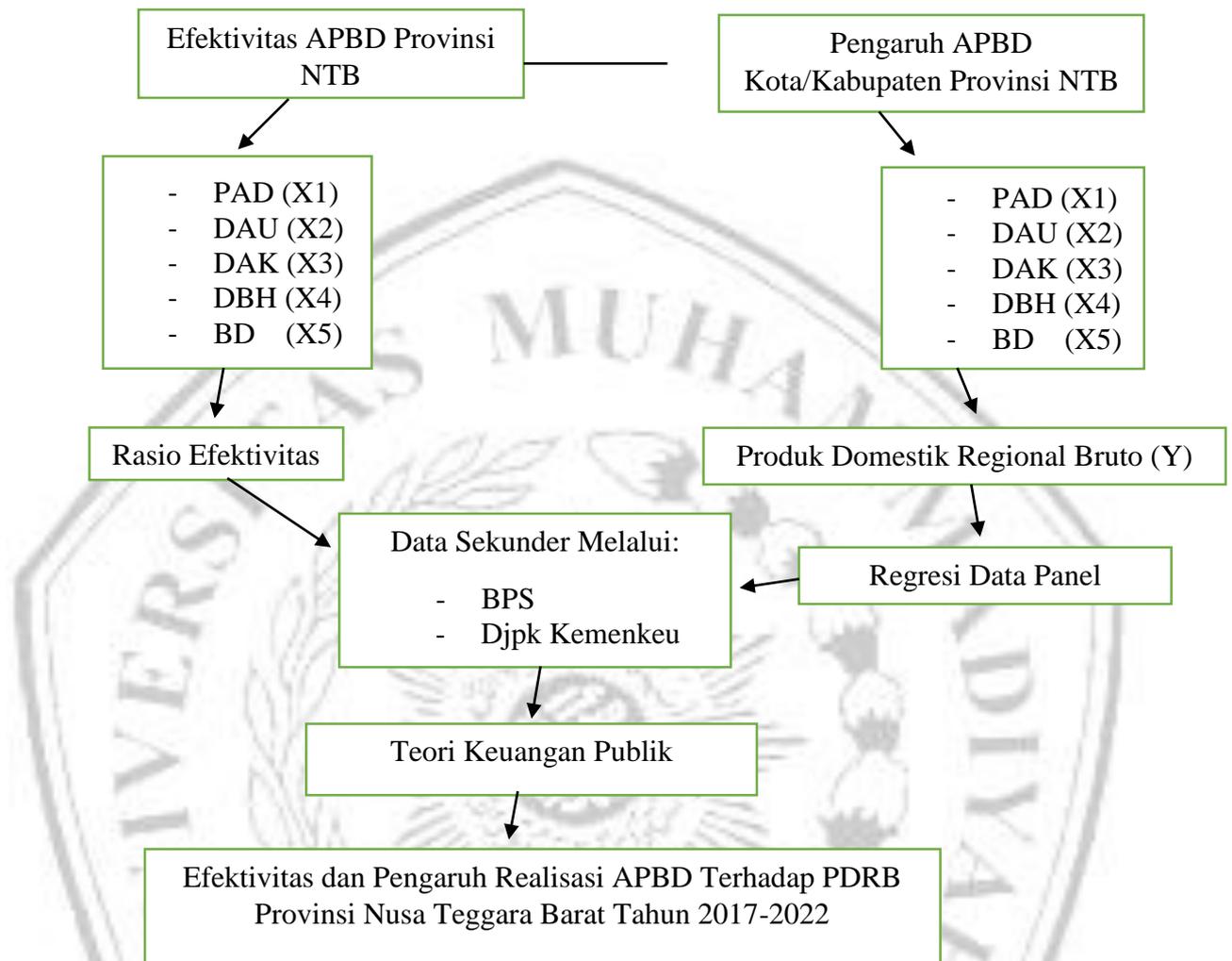
dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dan dana bagi hasil (DBH) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun, secara bersama-sama PAD, DAU, DAK dan DBH berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan secara simultan PAD, DAU, DAK dan DBH secara keseluruhan berpengaruh positif dan signifikan terhadap perekonomian Kota Manado (Meylani, 2019).

Penelitian Trianto dengan judul Analisis efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan di kota Palembang, menggunakan data sekunder menyatakan bahwa bahwa hasil penelitian ini mengungkapkan rata-rata nilai rasio efektivitas keuangan daerah Kota Palembang periode tahun 2003-2013 sudah bisa di tingkat yang efektif. Namun, secara efisiensi keuangan daerah Kota Palembang selama periode 2003-2013 rata-rata belum dapat mencapai tingkat efisien. Dari hasil tersebut dapat diketahui porsi penggunaan input (belanja) sudah melebihi dari 90 persen dibanding jumlah output (pendapatan) (Trianto, 2016).

Relevansi penelitian ini dengan beberapa penelitian terdahulu yakni pada tujuan penelitiannya menggunakan metode yang sama yaitu metode kuantitatif dengan analisis regresi linier berganda. Selain itu, variabel yang digunakan memiliki beberapa variabel yang sama seperti Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH) dan Belanja Daerah (BD). Adapun keterbaharuan dari penelitian-penelitian sebelumnya ialah pada demografi yang berbeda dimana penelitian saat ini melakukan penelitian di Kota/Kabupaten Provinsi Nusa Tenggara Barat, keterbaharuan waktu penelitian dan beberapa penambahan dalam variabel yang digunakan, dimana penelitian ini menggunakan 1 variabel dependen dengan 5 variabel independen untuk melihat pengaruh realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah terhadap pengelolaan pertumbuhan ekonomi di Nusa Tenggara Barat tahun 2017-2022.

1.3 Kerangka Fikir

Kerangka pemikiran teoritis dapat di tunjukkan oleh model gambar sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Berfikir

Kerangka yang tercermin dalam penelitian ini adalah menganalisis efektivitas APBD di Provinsi NTB. Selanjutnya menganalisis hubungan PDRB dan PDRB dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di NTB. Hubungan antar variabel ini sangat signifikan, karena mereka berlanjut sepanjang pertumbuhan ekonomi, khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dalam penelitian ini, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) digunakan untuk menilai dampak Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terhadap pertumbuhan ekonomi selama periode 2017-2022. APBD memegang peranan sentral dalam merancang, mengelola, dan mengembangkan kebijakan keuangan dalam setiap tahun untuk meningkatkan layanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, optimalisasi APBD dalam mendukung

pelayanan publik diharapkan mampu memacu pertumbuhan ekonomi di NTB. Dalam penelitian ini, pengaruh APBD pada PDRB tampak pada komponen pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil, dan pengeluaran daerah.

Alasan dipilihnya 5 industri tersebut adalah sebagai berikut:

- Pendapatan Asli Daerah (PAD):

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh oleh pemerintah daerah dari berbagai sumber yang berada di wilayahnya, termasuk pajak daerah, retribusi daerah, kekayaan daerah yang dimiliki, dan lain sebagainya. Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi salah satu komponen utama dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta memiliki potensi untuk memengaruhi besarnya pendapatan yang dapat digunakan dalam pengeluaran di daerah.

- Dana Alokasi Umum (DAU):

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang diberikan secara berkala oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah setiap tahun. Dana ini memiliki karakteristik fleksibilitas dan dapat digunakan untuk berbagai tujuan, termasuk pembiayaan belanja daerah. Besarannya ditetapkan berdasarkan sejumlah faktor, seperti jumlah penduduk, luas wilayah, indeks pembangunan, dan kondisi keuangan daerah.

- Dana Alokasi Khusus (DAK):

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah alokasi dana yang disediakan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk proyek-proyek khusus yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat. DAK sering memiliki kaitan tertentu, yang berarti harus digunakan sesuai dengan tujuan dan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. DAK dapat digunakan untuk mendukung pengeluaran daerah yang berkaitan dengan program-program tersebut.

- Dana Bagi Hasil (DBH):

Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang dikumpulkan oleh pemerintah daerah sebagai bagian dari pendapatan negara atau dari sumber daya alam yang ada di wilayahnya. Contoh dari DBH termasuk bagian hasil pajak, bagian hasil dari sumber daya alam seperti minyak bumi (minyak dan gas bumi), dan lain sebagainya. DBH juga dapat menjadi salah satu sumber pendapatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan digunakan untuk mendukung pengeluaran daerah.

- Belanja daerah mencerminkan penggunaan modal pemerintah daerah untuk membiayai operasional, pembangunan, dan pelayanan umum.

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), dan pengeluaran daerah merupakan sumber pendapatan yang digunakan untuk membiayai belanja daerah, termasuk dalam sektor infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pelayanan sosial, dan berbagai layanan lainnya. Dengan pemahaman tentang hubungan antara variabel-variabel ini, kita dapat menganalisis dampak APBD terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Provinsi NTB.

1.4 Hipotesis

Hipotesis adalah sebuah pernyataan yang diajukan untuk diuji kebenarannya melalui penelitian atau investigasi ilmiah. Hipotesis merupakan suatu dugaan awal atau prediksi tentang hubungan atau efek antara dua atau lebih variabel dalam konteks penelitian.

Berdasarkan pada rumusan masalah dan landasan teori yang kemukakan, maka hipotesis dalam penelitian ini ialah:

1. Terdapat pengaruh yang signifikan antara PAD terhadap PDRB di Provinsi Nusa Tenggara Barat periode 2017-2022.
2. Terdapat pengaruh yang signifikan antara DAU terhadap PDRB di Provinsi Nusa Tenggara Barat periode 2017-2022.
3. Terdapat pengaruh yang signifikan antara DAK terhadap PDRB di Provinsi Nusa Tenggara Barat periode 2017-2022.
4. Terdapat pengaruh yang signifikan antara Dana Bagi Hasil terhadap PDRB di Provinsi Nusa Tenggara Barat periode 2017-2022.
5. Terdapat pengaruh yang signifikan antara Belanja Daerah terhadap PDRB di Provinsi Nusa Tenggara Barat periode 2017-2022.